

Article Number :  
405-1534-1-SM  
Received :  
2022-10-01  
Accepted :  
2023-01-21  
Published :  
Volume : 09  
Issue : 01  
Month, Year  
July 2023  
pp.12-19

## **Peningkatan Kualitas Pelaporan DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran) Desa Kedungsolo Porong Sidoarjo Tahun 2022**

**Nur Silviah Rahmi<sup>1</sup>, Ni Wayan Surya Wardhani<sup>2</sup>, Adji A. Rinaldo Fernandes<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> *Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Brawijaya*

**\*Corresponding author:** [silviahrahmi@ub.ac.id](mailto:silviahrahmi@ub.ac.id)

### **ABSTRAK**

*Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak terhutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan bangunan, keadaan subjek pajak tidak ikut menentukan besarnya pajak. PBB dibayarkan melalui pemerintah desa, kemudian disetorkan ke bank daerah. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan terkait pemungutan PBB oleh pemerintah desa. Salah satunya di Desa Kedungsolo, masalah yang dihadapi adalah pencatatan masih secara manual dalam daftar buku oleh petugas desa, sehingga pencatatan secara klasik ini membutuhkan waktu lama apabila melakukan proses pencarian nama wajib pajak. Selain itu terdapat kesalahpahaman tentang pencatatan distribusi SPPT PBB oleh petugas, apakah benar sudah diterima oleh wajib pajak atau masih berada pada petugas tersebut. Solusi yang harus dilakukan adalah dengan mengembangkan sebuah sistem informasi yaitu dalam bentuk dashboard dengan bahasa pemrograman Hypertext Preprocessor (PHP) yang terintegrasi dengan MySQL untuk meningkatkan kualitas pelaporan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP). Aparat desa dan masyarakat setempat sangat terbantu dengan adanya sistem informasi Dashboard Data Entry SPPT PBB-P2. Dengan adanya sistem ini koordinator hanya memonitoring data pemungutan PBB yang diinput oleh petugas penarikan pajak, memberikan kemudahan petugas penarikan pajak yang berperan sebagai admin dalam pencatatan PBB secara online dan terstruktur, serta memudahkan wajib pajak untuk mengakses status SPPT PBB secara individu.*

### **KEYWORDS**

**PBB, DHKP, SPPT, Wajib Pajak, Dashboard**

### **PENGANTAR**

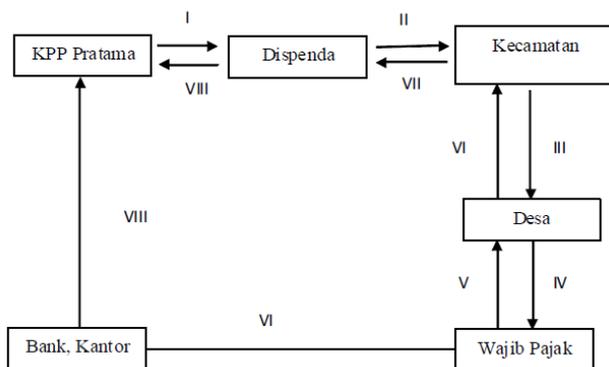
Desa Kedungsolo merupakan desa yang terletak di wilayah Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Desa Kedungsolo memiliki luas wilayah 119 hektare dengan ketinggian wilayah 4 meter. Berdasarkan data kependudukan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo tahun 2018, Desa Kedungsolo terdiri dari 4 Rukun Warga (RW) dan 10 Rukun Tetangga (RT) [1]. Jumlah penduduk Desa Kedungsolo sebanyak 4.432 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 1.105. Dengan

kepadatan penduduk yang cukup tinggi diperlukan adanya mekanisme pemungutan pajak PBB secara efisien.

Pajak Bumi dan Bangunan atau yang biasa disebut PBB adalah jenis pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terhutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan bangunan, keadaan subjek pajak tidak ikut menentukan besarnya pajak (UU PBB No. 12 Tahun 1994). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, bahwa PBB dulunya merupakan pajak pusat dan sekarang

wewenang pengelolaannya dilimpahkan menjadi pajak Kabupaten/kota. Pemerintah daerah berkepentingan untuk merumuskan kebijakan yang nantinya menjadi produk berupa peraturan daerah yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Mekanisme pemungutan pajak PBB yaitu dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) beserta Daftar Himunan Ketetapan Pajak (DHKP) oleh Pemerintah daerah melalui Dinas Pendapatan daerah yang didistribusikan melalui Kecamatan dan kemudian dibagikan ke setiap desa untuk dilaksanakan pemungutan. Berikut ini merupakan alur distribusi DHKP kepada wajib pajak yang difokuskan pada tingkat desa.



**Gambar 1. Prosedur Distribusi DHKP di Tingkat Kecamatan dan Desa**

Berdasarkan Gambar 1 pada tahap IV, SPPT Pajak Bumi dan Bangunan yang telah dihimpun oleh Kepala Desa dibagikan kepada masyarakat atau wajib pajak melalui perangkat desa. SPPT PBB disampaikan oleh petugas secara langsung kepada wajib pajak atau kuasanya (*door to door*) dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari. Petugas juga memiliki kewajiban untuk memungut pembayaran. Tahap V wajib pajak (WP) dapat secara langsung membayar ke petugas desa atau langsung datang ke kecamatan atau bank. Setelah proses pembayaran selesai, wajib pajak (WP) akan menerima tanda bukti pembayaran sementara untuk ditukarkan dengan Surat Tanda Terima Setoran. Petugas pemungut desa akan mencatat pembayaran tersebut dalam buku DHKP dan dilaporkan ke Kecamatan. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB

yang tidak dapat disampaikan pada tahap IV, oleh Kepala Desa akan dikembalikan ke Kecamatan.

Tahap VI: jika dalam jangka waktu enam hari sejak SPPT PBB yang didistribusikan oleh Kepala Desa kepada wajib pajak (WP) tidak juga dikenali siapa wajib pajak (WP) PBB yang bersangkutan maka pihak desa akan mengembalikan ke kecamatan. Pada tahap ini, pihak desa secara rutin menyusun rekapitulasi daftar pembayaran PBB untuk mengetahui berapa persen sudah terbayar sekaligus mengetahui jumlah piutang. Apabila terdapat hal-hal khusus yang memerlukan perhatian akan dibuat laporan untuk ditindaklanjuti oleh pihak kecamatan [2].

Mekanisme pendistribusian SPPT PBB dalam DHKP seperti alur diatas dalam prosesnya seringkali terjadi kesalahan, mulai dari salah nominal, salah penyetoran, SPPT yang tidak sesuai, dan ketidaksesuaian antara nominal uang yang disetorkan dengan hasil penagihan [3]. Basis data SPPT atau Wajib Pajak (WP) yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah sudah memiliki sistem informasi dalam pengolahannya, namun belum menjadi aplikasi untuk mengolah hasil pemungutan pajak untuk tingkat pemerintah desa yang notabene berinteraksi langsung dengan Wajib Pajak (WP). Kebutuhan pemerintah desa akan sistem informasi meliputi pengolahan data pajak, perhitungan hasil pajak yang akurat, laporan pembayaran dan progress pemungutan pajak secara berkala [4].

Hingga saat ini pendistribusian SPPT PBB dalam DHKP masih menjadi permasalahan di Desa Kedungsolo dikarenakan (1) pencatatan masih secara manual dalam daftar buku oleh petugas desa yang dibantu oleh tenaga magang atau mahasiswa Praktik Kerja Lapangan (PKL), sehingga pencatatan secara klasik ini membutuhkan waktu lama apabila melakukan proses pencarian nama wajib pajak, (2) Terdapat kesalahpahaman tentang pencatatan distribusi SPPT PBB oleh petugas, apakah benar sudah diterima oleh wajib pajak atau masih berada pada petugas tersebut. Hal itu membuat wajib pajak tidak bisa menunaikan pembayaran sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Melalui Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) tim dosen Departemen Statistika Fakultas MIPA Universitas Brawijaya 2022 yang diketuai oleh Prof. Dr. Ir. Ni Wayan Surya Wardhani, MS. yang beranggotakan Dr. Adji A. Rinaldo Fernandes, S.Si., M.Sc. dan Nur Silvyah Rahmi, S.Si., M.Stat. serta menggandeng dua mahasiswa melalui program Praktek Kerja Lapangan (PKL) melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan Kualitas Pelaporan DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran) Desa Kedungsolo Porong Sidoarjo Tahun 2022 yaitu dengan pembuatan *Standart Operasional Prosedur* (SOP) dan pembuatan aplikasi secara online. Dengan adanya program ini diharapkan wajib pajak dapat mengakses secara langsung status Surat Pemberitahuan dan status pembayaran Pajak Terutang (SPPT) PBB-nya secara individu dan pihak perangkat desa mendapatkan arsip yang teroganisir dengan baik dan berbasis online.

## BAHAN DAN METODE

### Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Pengabdian Kepada Masyarakat tahun 2022 bertempat di Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo diselenggarakan sejak bulan Maret sampai Oktober 2022.

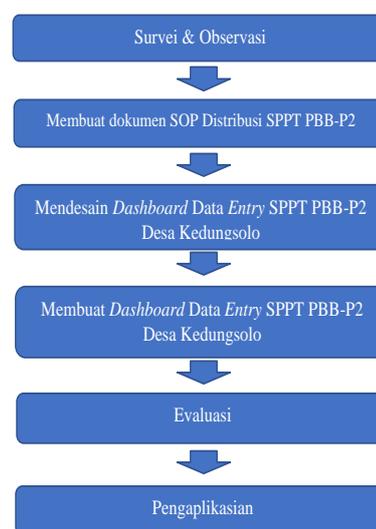


**Gambar 2. Kegiatan Diskusi Permasalahan**

### Metode Penelitian

Metode pelaksanaan kegiatan ini berupa perapian kembali dokumen SOP distribusi SPPT PBB-P2 Desa Kedungsolo. Kemudian mendesain *dashboard data entry* SPPT PBB-P2 Desa Kedungsolo. Tahap terakhir yaitu

membuat *dashboard* data entry menggunakan bahasa *Hypertext Preprocessor* (PHP) yang terintergrasi dengan MySQL dan di tautkan ke website Desa Kedungsolo yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi secara meluas tentang informasi SPPT desa. Adapun secara rinci, diagram alur penelitian adalah sebagai berikut:



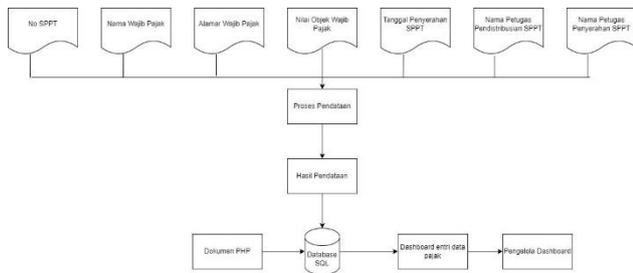
**Gambar 3. Alur Penelitian**

Dalam tahap survei dilakukan survei lapangan ke Desa Kedungsolo untuk menggali, serta mengobservasi proses pemungutan pajak yang dilakukan oleh petugas desa yang dibantu oleh mahasiswa PKL, pengelolaan data setelah pemungutan pajak, laporan DHKP yang dibuat oleh petugas desa dan melakukan wawancara untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh Desa Kedungsolo dalam proses pelaporan DHKP. Pada tahap ini juga dilakukan pembuatan kesepakatan kerjasama antara Desa Kedungsolo dan Jurusan Statistika terkait proses pelaporan DHKP Tahun 2022.

Tahap pembuatan dokumen SOP distribusi SPPT PBB-P2 yaitu dengan merapikan kembali SOP yang telah ada di Desa Kedungsolo. Pembuatan SOP bertujuan untuk memberikan pedoman kerja yang baku kepada setiap individu yang terlibat di tiap-tiap bagian.

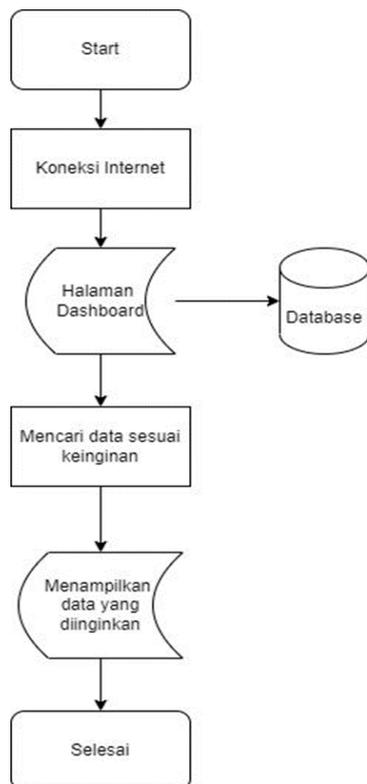
Proses mendesain *dashboard data entry* SPPT PBB-P2 Desa Kedungsolo yaitu dengan merancang kerangka masalah, membuat *flowchart dashboard* dan *flowchart admin*. Kerangka masalah berisi perancangan *database*

sql yang berfungsi untuk menyimpan data sppt yang telah diinput dalam *dashboard*, *flowchart dashboard* berisi perancangan proses alur aplikasi sedangkan *flowchart admin* berisi alur admin dalam penginputan data. Berikut kerangka masalah dapat dilihat pada Gambar 4.



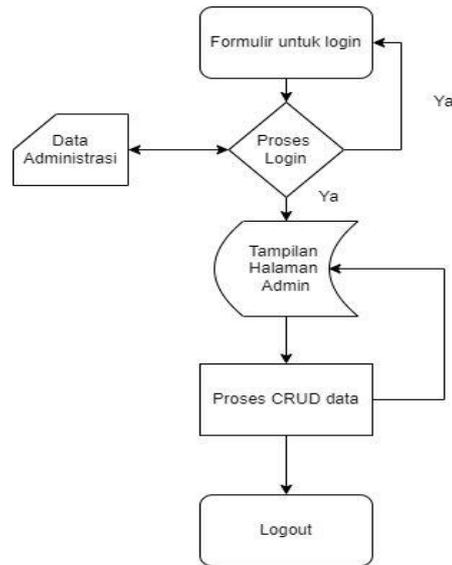
Gambar 4. Kerangka Masalah

Flowchart dashboard data entry SPPT PBB-P2 dapat dilihat pada Gambar 5. di bawah ini.



Gambar 5. Flowchart dashboard data entry SPPT PBB-P2

Flowchart admin dapat dilihat pada Gambar.6 berikut:



Gambar 6. Flowchart admin

Pada tahap pembuatan *dashboard* data entry SPPT PBB-P2 Desa Kedungsolo menggunakan bahasa *Hypertext Preprocessor* (PHP) yang terintegrasi pada MySQL dengan menggunakan *software* Visual Studio Code. Fitur tampilan pada *dashboard* seperti menambah, menghapus, mengedit dan mencari data dicoding dengan menggunakan bahasa *Hypertext Preprocessor* PHP. Sedangkan data yang akan diinputkan ke dalam *dashboard* seperti nomor SPPT, nama wajib pajak, alamat wajib pajak, nilai objek pajak, tanggal penyerahan SPPT, nama petugas pendistribusian SPPT serta nama petugas penyerahan SPPT disimpan dalam sistem manajemen database MySQL.

Pada tahap evaluasi dilakukan untuk mendapatkan kesesuaian tujuan awal dalam pembuatannya. Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan mekanisme klasik dengan mekanisme penginputan data secara online melalui *dashboard*.

Proses pengaplikasian dilakukan dengan mengadakan sosialisasi kepada aparat desa dan warga tentang penggunaan *dashboard* data entry SPPT PBB-P2 Desa Kedungsolo.

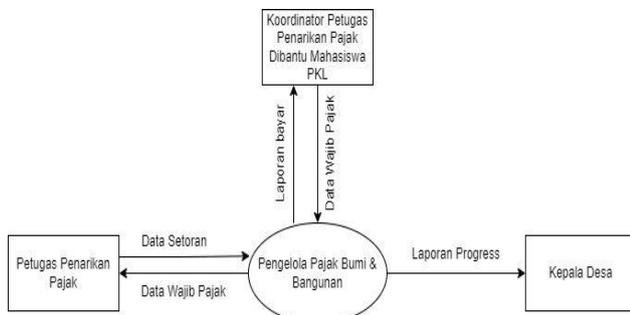
## HASIL DAN DISKUSI

### Tahap Perencanaan Kebutuhan

Mekanisme pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Kedungsolo sesuai

prosesur yang telah ditentukan sebelumnya yaitu dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) beserta Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah yang didistribusikan melalui kecamatan dan kemudian dibagikan ke setiap desa untuk dilaksanakan pemungutan. Setelah DHKP dan SPPT telah dihimpun oleh pemerintah desa kemudian pemerintah desa membuat tim pemungutan pajak yang terdiri atas petugas penarikan pajak dan koordinator petugas penarikan pajak yang dibantu oleh mahasiswa PKL. Masing-masing petugas penarikan pajak diamanahi data SPPT wajib pajak (WP) yang harus ditagih, setelah melakukan penagihan kepada wajib pajak (WP) petugas penarikan pajak kemudian menyerahkan hasil pemungutan kepada koordinator petugas penarikan pajak, setelah itu koordinator petugas penarikan pajak merekap setiap setoran dan disetorkan ke bank. Mekanisme pengumpulan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) digambarkan dalam diagram mekanisme.

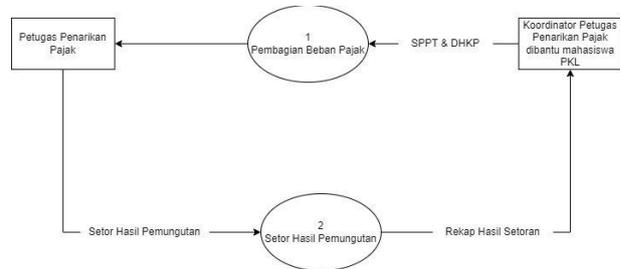
Diagram mekanisme berisi alur proses pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang selama ini berjalan di Desa Kedungsolo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, menggambarkan hubungan yang terlibat antara lain petugas penarikan pajak, kordinator petugas penarikan pajak dan kepala desa, seluruh petugas merupakan perangkat desa yang dibantu oleh mahasiswa PKL. Berikut diagram mekanisme yang sedang berjalan:



Gambar 6. Diagram Mekanisme

Diagram mekanisme dejaslakan lebih rinci pada diagram detail mekanisme. Diagram ini menjelaskan tentang mekanisme yang berjalan memiliki dua sub hubungan yaitu 1 proses pembagian beban pajak dan 2 sektor hasil

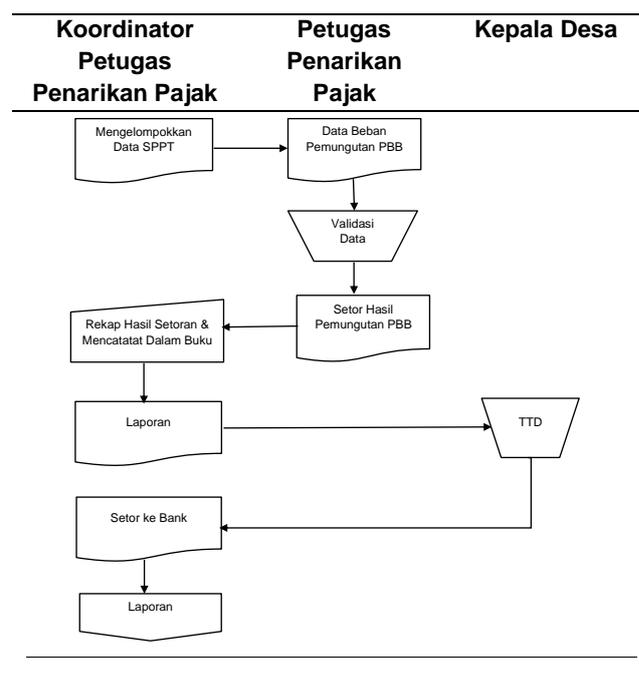
pemungutan. Di dalam diagram detail mekanisme hanya ada dua peran yaitu petugas penarikan pajak dan koordinator petugas penarikan pajak yang dibantu oleh mahasiswa PKL. Diagram detail mekanisme dapat dilihat pada Gambar 7.



Gambar 7. Diagram Detail Mekanisme

Setelah menggambarkan diagram detail mekanisme, kemudian menggambarkan alur berkas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sedang berlaku. Alur berkas pemungutan pajak akan digambarkan pada diagram *flowmap* yaitu gabungan peta dan *flowchart*, yang menunjukkan pergerakan berkas pemungutan pajak dari satu pihak ke pihak lain. Di dalam diagram *flowmap* terdapat tiga peran yaitu koordinator petugas penarikan pajak, petugas penarikan pajak dan kepala desa. Diagram *flowmap* dapat dilihat pada Table 1. berikut:

Table 1. Diagram Flowmap alur berkas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)



Berdasarkan Tabel 1. dapat dilihat bahwa kelemahan mekanisme yang sedang berlaku belum menggunakan sistem yang terstruktur, pencatatan masih secara manual dalam daftar buku oleh koordinator petugas penarikan pajak dan rentan terjadi kesalahan tulis nomor SPPT atau nomor SPPT yang tertukar, terdapat kesalahpahaman tentang pencatatan distribusi SPPT PBB oleh petugas, apakah benar sudah diterima oleh wajib pajak (WP) atau masih berada pada petugas penarikan pajak. Hal tersebut membuat wajib pajak (WP) tidak bisa melakukan pembayaran secara tepat waktu sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Selain itu berkas laporan yang akan disetorkan ke bank tidak efisien dan rentan terjadi ketidaksesuaian antara nominal dan jumlah uang, progress tiap kolektor sulit untuk dipantau serta Wajib Pajak (WP) tidak dapat mengakses secara langsung status Surat Pemberitahuan dan status pembayaran Pajak Terutang (SPPT) PBB-nya secara individu.



**Gambar 8. Kegiatan Diskusi di Desa Kedungsolo**

#### Solusi Pemecahan Masalah

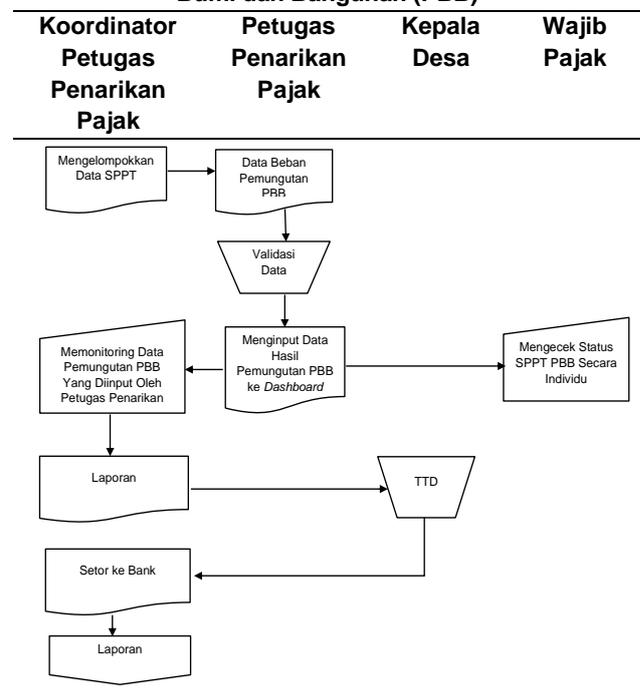
Solusi pemecahan masalah adalah dengan mengembangkan sebuah sistem informasi yaitu dalam bentuk *dashboard* untuk meningkatkan Kualitas Pelaporan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) di Desa Kedungsolo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo. Dengan adanya sistem ini koordinator petugas penarikan pajak tidak lagi merekap data hasil pemungutan PBB dan memindah ke dalam catatan buku secara manual melainkan hanya memonitoring data pemungutan PBB yang diinput oleh petugas penarikan pajak, memberikan kemudahan petugas penarikan pajak yang berperan sebagai admin dalam

pencatatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara online dan terstruktur, serta untuk memudahkan wajib pajak (WP) untuk mengakses secara langsung status Surat Pemberitahuan dan status pembayaran Pajak Terutang (SPPT) PBB secara individu.

Sistem informasi yang diusulkan ke Desa Kedungsolo

Sistem informasi yang akan diusulkan ke Desa Kedungsolo adalah berupa pembuatan *Dashboard Data Entry* SPPT PBB-P2 menggunakan bahasa *Hypertext Preprocessor* (PHP) yang terintegrasi dengan MySQL, dengan adanya *dashboard* ini memudahkan petugas penarikan pajak dalam menginput Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan mempermudah koordinator petugas penarikan pajak untuk memantau pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Usulan sistem informasi digambarkan dalam bentuk *flowmap* pada Tabel 2 berikut.

**Table 2. Flowmap Sistem Informasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**



#### Hasil Perencanaan Sistem

Form login untuk admin

Tampilan antarmuka form login pada *dashboard* untuk admin dapat dilihat pada Gambar 8.



Gambar 8. Tampilan Form Login

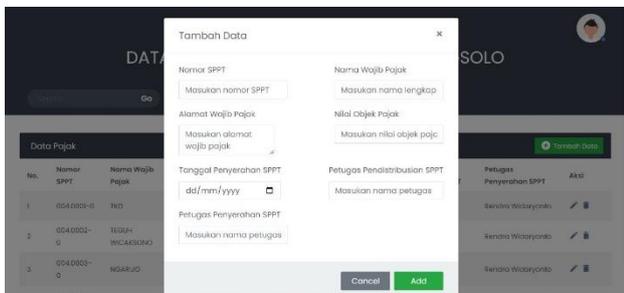
Progress

Pada Gambar 9. menampilkan antarmuka untuk progress pengumpulan PBB oleh admin.



Gambar 9. Tampilan Progress Pengumpulan Pajak

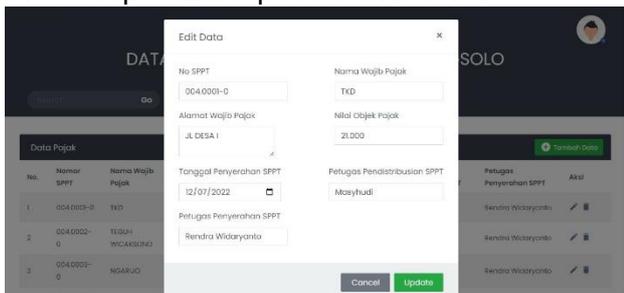
Pada Gambar 10. Menampilkan antarmuka untuk menu tambah SPPT.



Gambar 10. Tampilan Tambah SPPT

Ubah SPPT

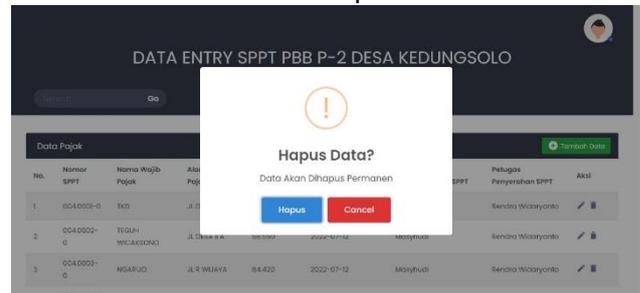
Tampilan antar muka menu untuk ubah SPPT dapat dilihat pada Gambar 11.



Gambar 11. Tampilan Ubah SPPT

Hapus SPPT

Berikut pada Gambar 12. menampilkan antarmuka manu untuk hapus SPPT.



Gambar 12. Tampilan Hapus SPPT

Cetak SPPT

Pada Gambar 13. menampilkan antarmuka menu untuk mencetak SPPT yang sudah diupload. Hasil cetak SPPT dalam bentuk file excel.



Gambar 13. Tampilan Cetak SPPT

Tampilan dashboard untuk masyarakat

Tampilan antarmuka dashboard untuk masyarakat dapat dilihat pada Gambar 14. Di bawah ini.



Gambar 14. Tampilan Dashboard untuk Masyarakat

KESIMPULAN dan SARAN

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh tim dosen Departemen Statistika fakultas MIPA Universitas Brawijaya di Desa Kedungsolo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo berhasil berjalan dengan baik dan lancar. Aparat desa terutama yang bertugas langsung dalam pemungutan pajak sangat

terbantu dengan adanya sistem informasi Dashboard Data Entry SPPT PBB-P2. Dengan adanya sistem ini koordinator tidak lagi merekap data hasil pemungutan PBB dan memindah ke dalam catatan buku secara manual melainkan hanya memonitoring data pemungutan PBB yang diinput oleh petugas penarikan pajak, memberikan kemudahan petugas penarikan pajak yang berperan sebagai admin dalam pencatatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara online dan terstruktur, serta untuk memudahkan wajib pajak (WP) untuk mengakses secara langsung status Surat Pemberitahuan dan status pembayaran Pajak Terutang (SPPT) PBB secara individu.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa saran. Adapun saran dari penelitian ini adalah: 1) Password pada akun admin harus diupdate secara berkala untuk meningkatkan keamanan. 2) Diharapkan ada penelitian lebih lanjut agar bisa menjadi sebuah aplikasi yang utuh yang dapat membantu kebutuhan Desa Kedungsolo dalam pemungutan PBB secara keseluruhan.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Skim Dana DPP/SPP Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Brawijaya (UB) yang telah mendanai tim dosen Departemen Statistika Fakultas MIPA Universitas Brawijaya di Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo sehingga kegiatan pengabdian ini dapat terlaksana. Terima kasih juga tim sampaikan kepada Pemerintah Desa Kedungsolo dan staff jajarannya serta masyarakat setempat yang telah mendukung serta menerima tim dosen Departemen Statistika dalam mengimplementasikan ide dan program kerja.

### REFERENSI

- [1] *Kecamatan Porong dalam Angka 2018*. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018.
- [2] *Pedoman Umum Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*. Kementerian

*Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2014.*

- [3] *Ella Helmi Israel, M., Bayu Surarso, and Ibnu Widiyanto. RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (STUDI KASUS PADA SKPD DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA INERAL KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE)*. Diss. Universitas Diponegoro, 2012.

- [4] *Hidayat, Cipi Rahmat, and Doni Ramdanis. "Sistem informasi pengolahan data pemungutan pajak bumi dan bangunan."* *Sisfotnika* 6.1 (2016): 81-90.